

## *Kejagung Diminta Usut ....*

**Dari Halaman 1**

Kecamatan Sungai Pinang (Desa Rantau Nangka), Kecamatan Aranio (Desa Tambela), Kecamatan Mataraman (Desa Baru, Tanah Abang, dan Bawahan Pasar), Kecamatan Martapura Barat (Desa Antasan Sutun, Keliling Benteng Tengah,, Keliling Benteng Ulu, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, Sungai Rangsang, Sungai Rangsang Hambuku, Sungai Rangsang Tengah, Sungai Rangsang Ulu, Tangkas, Teluk Selong, dan Teluk Selong Ulu).

Kecamatan Martapura Timur (Desa Pekauman, Pekauman Ulu, Pekauman Dalam, Mekar Melayu, Melayu Ilir, Melayu Tengah, Akar Bagantung, Keramat, Keramat Baru, Akar Baru Dalam Pagar Ulu, Dalam Pagar, Sungai Kitano Pematang Baru, Antasan Senior Ilir, Antasan Senior, Tambak Anyar Ilir, Tambak Anyar, dan Tambak Anyar Ulu).

Terakhir, Kecamatan Cintapuri Darussalam (Desa Alalak Padang, Benua Anyar, Simpang Lima, dan Makmur Karya). Sedangkan kecamatan lainnya sudah tidak adaogenesis.(cnni)js

**Dari Halaman 1**

warga lainnya.

Namun suasana forum yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah mencekam. Warga mengaku Camat Percut Sei Tuan diduga melontarkan pernyataan bernada ancaman, dengan menyebut bahwa warga yang menolak pembangunan TPA dapat dipidanakan.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan ketakutan dan kebingungan di tengah masyarakat. Warga merasa diintimidasi dan hak mereka untuk menyampaikan aspirasi seolah ditekan oleh aparat pemerintah.

"Apakah boleh seorang pejabat menggunakan ancaman pidana kepada warganya hanya karena menyampaikan penolakan?" kata salah satu warga dengan nada kecewa.

***Dari Halaman 1***

Teddy dalam Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Minggu (28/12).

Rosan menyampaikan huntara lainnya akan menyusul diselesaikan. Proses pembangunan terus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

"Hunian lainnya juga sedang dibangun oleh BNPB, Kementerian PU serta Kementerian Perumahan," tulis keterangan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga meminta laporan perkembangan mengenai kampung Haji di Kota Makkah, Arab Saudi, terutama terkait titik lokasi menara, luas lokasi serta

**Dari Halaman 1**

transportasi (Jaklingko dan Transjakarta), serta air bersih. Hasilnya, para buruh menyatakan tidak menerima insentif tersebut. Dari total sekitar 300 karyawan, hanya sekitar 15 orang yang menerima.

"Artinya, hanya sekitar 5 persen buruh yang menerima insentif tersebut, sementara upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja. Ini jelas tidak masuk akal," ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi setara dengan KHL, yakni Rp5,89 juta per bulan.

KSPI juga menuntut kenaikan UMSP DKI 2026 sebesar 2-5 persen di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri.

Adapun terkait penetapan UMSP 2026 se-Jawa Barat, serikat buruh mengatakan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSP dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut Said Iqbal, rekomendasi tersebut justru dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan oleh Dedi Mulyadi. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSP.

**Dari Halaman 1**

kita juga) pura-pura tuli dan melanjutkan aksi menggunduli hutan.

Inilah klimaksnya. Ketika langit akhirnya menepati janjinya (yang sudah diumumkan BMKG 72 jam sebelumnya), dan tanah yang sudah botak (yang sudah diidentifikasi KRB) tak lagi sanggup menahan air, terjadilah "Pesta Bencana." Lalu, dimulailah "Drama Tanggap Darurat," sebuah tayangan realitas paling populer. Ratingnya selalu tinggi. Adegan-adegannya standar.

Ada adegan evakuasi dengan perahu karet, alam bak penuh dengan air mata dan pelukan, diiringi narasi reporter yang dramatis.

Lalu ada adegan kunjungan pejabat dan pesohor, Sang menteri atau gubernur datang dengan pakaian yang selalu lebih bersih daripada air banjir di lokasi. Kalimat wajib, "Kami akan kaji lebih dalam dan koordinasi dengan semua pihak." (Kajian yang kesekian kalinya).

Adegan wawancara pakar pun meledak. Inilah monolog intelektual puncak. Dengan grafik dan peta, sang pakar akan mengatakan, "Ini adalah buah dari kombinasi faktor meteorologis ekstrem dan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan." (Alih fungsi lahan = hutan jadi sawit, sawi jadi tambang, tambang jadi kubangan, kubangan jadi banjir).

Penonton di rumah manggut-manggut, "Wah, pintar sekali pak profesornya," lalu beralih channel.

Setelah banjir surut dan longsor mengering, kita masuk ke fase "Lupa dan Ulangi". Bantuan logistik telah dibagikan, laporan pertanggungjawaban dana tanggap darurat telah dibuat (dengan format yang sangat rapi), dan foto-foto kepahlawanan sudah diunggah di berbagai plat-

Sikap Camat Percut Sei Tuan ini menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, terlebih dalam persoalan yang menyangkut lingkungan dan keselamatan hidup masyarakat.

Jika dugaan ancaman terhadap warga ini terbukti, publik mendesak Bupati Deliserdang untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan sanksi dan mencopot Camat Percut Sei Tuan dari jabatannya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam menjunjung tinggi hak warga, transparansi kebijakan serta tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

(A-10)

pelaksanaan pembangunannya.

Rosan menyampaikan pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut, apalagi setelah Putra Mahkota Mohammed Bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Prabowo pada 8 Desember lalu.

Menteri Rosan sebelumnya telah 4 kali bertemu dengan Pemerintah Saudi membahas ini. Tujuannya agar seluruh jamaah Haji Indonesia memiliki tempat & fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah Haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram. **(cnni/js)**

Menurutnya, alasan potensi PHK yang diduga akan dinilai tidak berdasar. Sebab pada tahun sebelumnya, setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan. Contohnya, UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret dengan alasan perusahaan tidak mampu, meskipun perusahaan-perusahaan raksasa seperti Epson dan Panasonic beroperasi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Jawa Barat menuntut agar Dedi Mulyadi menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat dan merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK 2026.

Terkait langkah lanjutan, KSPI menyiapkan dua langkah utama. Pertama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan penetapan UMSK Jawa Barat, serta mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatera Utara.

Kedua, melakukan aksi besar-besaran. Aksi akan dilakukan serentak selama dua hari, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara atau DPR RI.

Jika aspirasi besok dan lusa tidak didengar, KSPI menegaskan demo berjilid-jilid akan dilanjutkan pada Januari, Februari, dan seterusnya.

"Bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional," pungkas Said Iqbal.(cnni-  
js)

form berita Atau sekadar cerita.

Lalu, aktivitas yang menjadi akar masalah—pembukaan lahan baru, penembangan, pembangunan di bantaran sungai—akan kembali dilakukan, seringkali dengan intensitas lebih besar untuk "mengejar kerugian". KRB edisi terbaru pun mulai disusun, dengan data kerusakan terbaru yang lebih parah dari sebelumnya. Siklus itu suci dan tak terganggu.

Kita seolah telah menjadiseniman repetisi yang ulung. Kita mengulang kesalahan yang sama, dengan presisi yang tinggi, dan selalu bertanya dengan wajah polos setelahnya, "Kok bisa ya terjadi lagi?"

Mungkin sudah saatnya kita akui bahwa ini bukan lagi soal kegagalan sistem, tapi tentang adopsi sebuah tradisi baru yang bernama "Tradisi Bencana Terkelola". Kita begitu ahli dalam merespons bencana, tapi alergi dalam mencegahnya.

Pencegahan itu tidak fotogenik, tidak dramatis, dan tidak menghasilkan proyek banjir-dana yang cepat cair.

Jadi, selamat datang di Sumatera, tempat di mana peringatan adalah bahan latar belakang, laporan adalah artefak museum, dan bencana adalah tontonan rutin.

Sampai kita memutuskan untuk mengubah ritual "Tanggap Darurat" menjadi ritual "Tangguh Sebelum Darurat", upacara bendera putih—lambang siaga satu—ini akan terus berkibar di langit kelam Sumatera, diiringi deru helikopter dan lengkingan sirine, sebagai soundtrack tetap dari sebuah pulau yang seolah-olah dengan sukarela memilih untuk bergerak mundur ke dalam siklus air mata dan lumpurnya sendiri. (\*)

*Gempa Guncang .....*

Afrida mengutip Antara.

Ia mengaku merasakan dua kali getaran gempa saat dirinya bersama keluarga tengah berkumpul di dalam rumah.

Pada gempa pertama, ia dan keluarga masih bertahan di dalam rumah sembari menyaksikan televisi.

Tak lama, ia merasakan gempa susulan yang cukup besar dari gempa pertama.

"Saya dan keluarga langsung keluar dari rumah, karena khawatir rumah ambruk," katanya.

Gempa bumi melanda Agam dengan kekuatan bermagnitudo 4,6 Lok: 0.17 LS - 100.10 BT (18 kilometer Timur Laut Agam-Sumbar), kedalaman 10 kilometer pada pukul 09.11.34 WIB.

Setelah itu bermagnitudo 4,7 pada pukul 09.15.46 WIB.

Gempa terasa hingga Bukittinggi

Getaran gempa dirasakan cukup kuat masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan parameter skala MMI, gempa dirasakan III-IV MMI di Agam dan Bukittinggi, serta II-III MMI di Padang Panjang dan Payakumbuh. Pada skala itu, getaran dirasakan jelas di dalam rumah dan beberapa benda ringan sempat bergoyang. **.(cnni)js**



**Dari Halaman 1**

selalu sejalan dengan kepuasan publik.

Di titik inilah kemampuan Maratua Simanjuntak masih layak bahkan wajib dipertanyakan. Sebab, MUI bukan organisasi biasa. Ia adalah lembaga moral, penjaga nurani umat, dan seharusnya menjadi suara profetik di tengah kegamangan sosial.

Selama periode kepemimpinannya, MUI Sumut relatif minim gebrakan substantif.

Aktivitas MUI lebih banyak terdengar dalam bentuk pernyataan normatif, seremonial keagamaan, atau respons reaktif terhadap isu-isu insidental. Padahal, Sumatera Utara tengah menghadapi persoalan serius: kemiskinan struktural, narkoba yang menggerogoti generasi muda, konflik agraria, degradasi etika publik, hingga banjir informasi keagamaan di ruang digital yang sering kali menyesatkan umat.

Di tengah realitas tersebut, kehadiran MUI Sumut belum terasa sebagai kekuatan moral yang memimpin arah, melainkan cenderung menjadi penonton yang sopan. MUI seharusnya tidak hanya hadir dalam forum-forum resmi atau menjadi pengisi khutbah simbolik, tetapi tampil sebagai lembaga yang menginisiasi gerakan sosial keumatan secara terukur dan berkelanjutan.

Persoalan lain adalah kecenderungan MUI Sumut yang terlalu nyaman berada di lingkaran kekuasaan. Fungsi shad-idul hukum mitra kritis pemerintah sering kali terasa tumpul. MUI lebih sering terlihat sebagai mitra yang membenarkan, bukan menegur. Akibatnya, posisi MUI sebagai penjaga moral publik berisiko tereduksi menjadi stempel legitimasi kebijakan, bukan penyeimbang kekuasaan.

Umat membutuhkan MUI yang berani berkata tidak ketika kebijakan publik melukai rasa keadilan.

MUI yang berani berdiri bersama masyarakat kecil ketika negara abai. Jika keberanian ini absen, maka otoritas keulamaan akan perlahan kehilangan daya pengaruhnya di mata publik, terutama generasi muda.

Terpilihnya kembali Maratua Simanjuntak sejatinya adalah kesempatan terakhir untuk pembuktian, bukan perayaan kemenangan. Tidak ada lagi alasan transisi, adaptasi, atau belajar dari periode sebelumnya. Publik berhak menuntut agenda yang jelas: apa prioritas MUI Sumut lima tahun ke depan? Bagaimana MUI menjawab tantangan digitalisasi dakwah? Di mana posisi MUI dalam isu keadilan sosial dan kemanusiaan?

Jika MUI Sumut tetap berjalan dengan pola lama aman, normatif, dan minim keberpihakan maka pertanyaan tentang kemampuan kepemimpinan Maratua akan terus menguat. Sebaliknya, jika Maratua mampu mengubah MUI menjadi lembaga yang progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan umat luas, kritik ini akan gugur dengan sendirinya.

Mempertanyakan kemampuan Ketua Umum MUI bukanlah tindakan tidak sopan, apalagi anti- ulama. Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari harapan agar MUI kembali menjadi kompas akhlak, bukan sekadar institusi simbolik. Umat tidak membutuhkan MUI yang sekadar ada, tetapi MUI yang hadir dan berani.